



REPUBLIK INDONESIA



KERANGKA RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2018 PRIORITAS NASIONAL 10: POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Disampaikan dalam **Temu Konsultasi Bappenas-Bappeda Triwulan I Tahun 2017**

KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
13 Januari 2017

HIGHLIGHT CAPAIAN DAN TANTANGAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

CAPAIAN:

- Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 73,04
- Angka prevalensi penyalahguna narkoba: 2,2%
- Capaian Aksi PPK* Pusat 88,5%, Daerah 49,4%
- **Capaian RB terlampir**

CAPAIAN:

- Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 72,82
- Angka prevalensi penyalahguna narkoba: 1,8%
- Capaian Aksi PPK Pusat 92%, Daerah 53%
- **Capaian RB terlampir**

TARGET:

- Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 74,3
- Angka prevalensi penyalahguna narkoba: 1,96%
- Capaian Aksi PPK Pusat 92%, Daerah 53%**
- **Target RB terlampir**

TARGET:

- Skor IDI: 74.6
- Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba: 1,93%
- Capaian Aksi PPK Pusat 94%, Daerah 57%
- **Target RB terlampir**

TARGET:

- Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 75
- Angka prevalensi penyalahguna narkoba: 1,93%
- Capaian Aksi PPK Pusat 95%, Daerah 61%
- **Target RB terlampir**

2015

2016

2017

2018

2019

TANTANGAN:

- Perlunya kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada Serentak (kali pertama)
- Bertambahnya narkoba jenis baru
- Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Aksi PPK di daerah
- **Tantangan RB terlampir**

TANTANGAN:

- Masih kurangnya peran DPRD dalam mewakili aspirasi masyarakat
- Terbatasnya kapasitas rehabilitasi
- Perubahan mekanisme koordinasi pelaksanaan Aksi PPK
- **Tantangan RB terlampir**

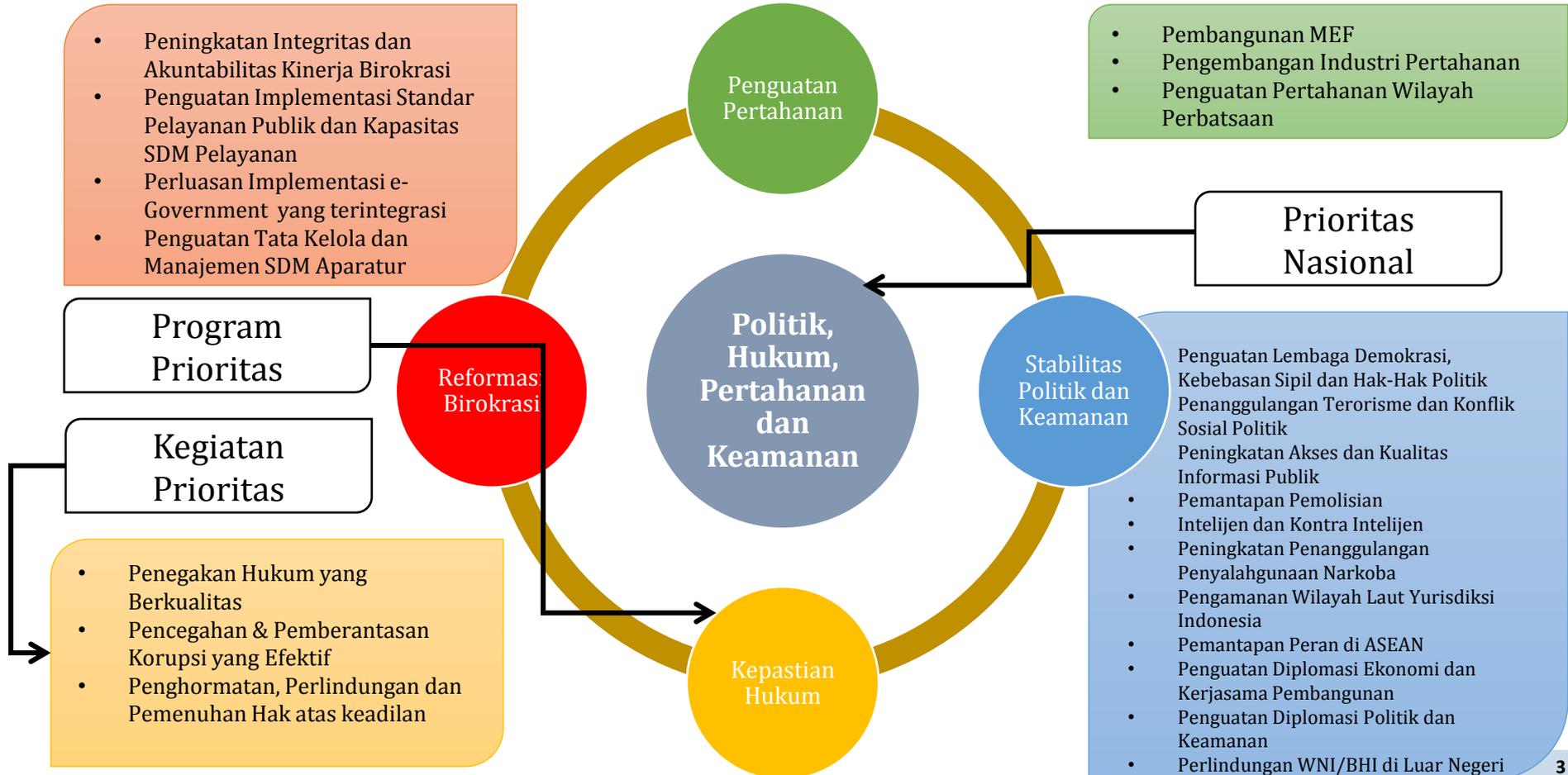
TANTANGAN:

- Kurangnya akuntabilitas parpol
- Adanya regenerasi penyalahguna
- Perubahan mekanisme koordinasi pelaksanaan Aksi PPK
- **Tantangan RB terlampir**

**TAHUN
PENENTUAN
PENCAPAIAN
TARGET RPJMN
2015-2019**

*PPK : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
**Aksi PPK 2016-2017 digabungkan pelaksanaannya dalam Inpres 10/2016

PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN



KEGIATAN PRIORITAS:

Penguatan Pertahanan
Wilayah Perbatasan

PROYEK PRIORITAS NASIONAL:

Pemantapan Pertahanan di
Wilayah Natuna dan
Perbatasan

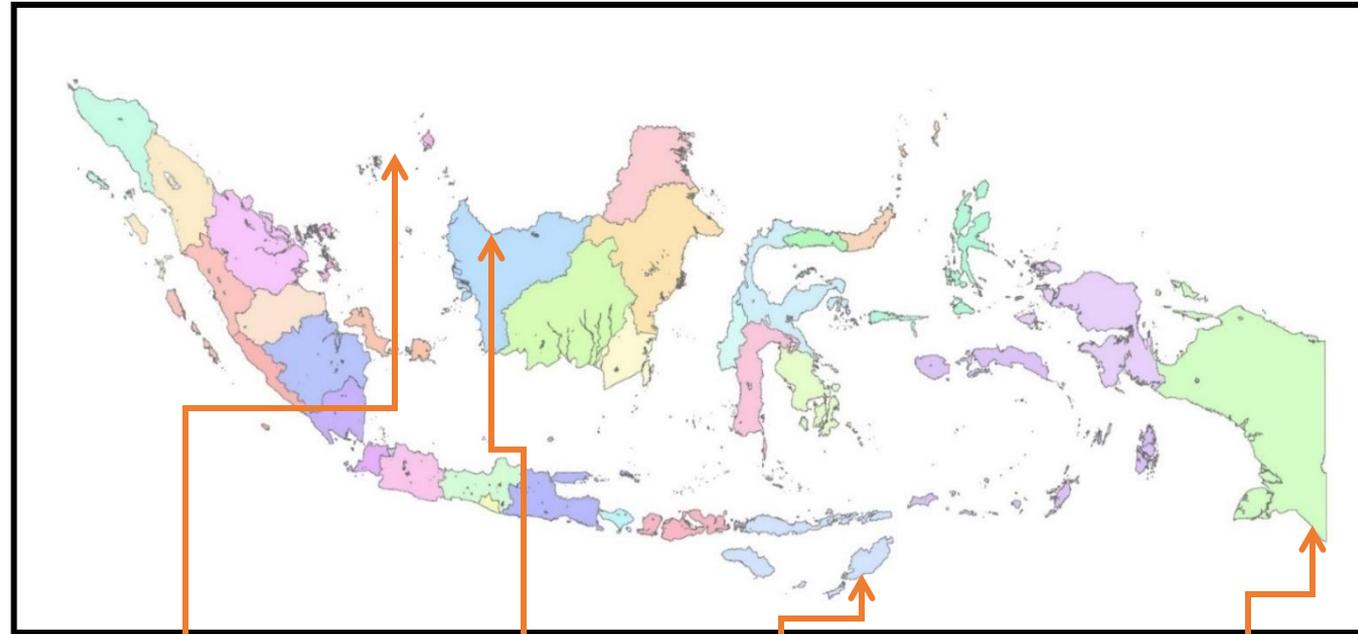
TINDAK LANJUT 2018:

Keselarasan dengan RTRW di
propinsi-propinsi yang memiliki
daerah perbatasan

DINAS/SKPD TERKAIT:

- Dinas Tata Ruang

TARGET INDIKATIF RKP 2018:



Natuna: Pembangunan
Dermaga dan
Apron Lanud

Kalimantan :
Pembangunan JIPP
dan Pos Perbatasan

NTT: Pembangunan
Dermaga dan
Apron Lanud

Papua: Pembangunan
Dermaga dan
Apron Lanud

HIGHLIGHT PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN (1)

KEGIATAN PRIORITAS:

Peningkatan Penanggulangan
Penyalahgunaan Narkoba

KEGIATAN PRIORITAS:

Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil,
dan Hak-Hak Politik

KEGIATAN PRIORITAS:

Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial
Politik

PROYEK PRIORITAS NASIONAL:

Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan
Narkoba

PROYEK PRIORITAS NASIONAL:

Pendidikan Pemilih, Pengawasan Pemilu Partisipatif,
Bantuan Keuangan Partai Politik

PROYEK PRIORITAS NASIONAL:

Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,
Penguatan dan Pemberdayaan Forum-Forum Dialog
Kewaspadaan Nasional

DASAR PERTIMBANGAN/ TARGET:

- Rehabilitasi "100.000" penyalahguna narkoba (Direktif Presiden, 2015)
- Capaian 2016 : 27.175 orang
- Capaian 2017: 44.720 orang

TINDAK LANJUT 2018:

Lembaga Rehabilitasi
Instansi Pemerintah
(LRIP):

- Bimtek untuk 839 lembaga
- Pelayanan rehab untuk 21.190 peserta

Lembaga Rehabilitasi
Komponen
Masyarakat (LRKM):

- Bimtek untuk 218 lembaga
- Pelayanan rehab untuk 10.000 orang

DASAR PERTIMBANGAN/ TARGET:

- Persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak Presiden dan Legislatif 2019
- Optimalisasi peran Pokja IDI di 34 Provinsi Indonesia (IDI)

DINAS/SKPD TERKAIT :

- Bappeda Provinsi
- Dinas/Badan/Kantor Kesbangpol
- KPUD
- Bawaslu Prov/Kab/ Kota

TINDAK LANJUT 2018:

- Operasionalisasi Pusat Pendidikan Pemilih di Provinsi/Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Pemilu Serentak 2019
- Publikasi Pemilu dan Pemilukada
- Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di 34 Provinsi
- Peningkatan Bantuan Keuangan Parpol di daerah
- Pengakomodasian IDI ke dalam dokumen RPJMD di 34 Provinsi

DASAR PERTIMBANGAN/ TARGET:

- Tren polarisasi sosial politik di masyarakat
- Dilaksanakannya Strategi Nasional Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di 34 Provinsi

DINAS/SKPD TERKAIT :

- Dinas/Badan/Kantor Kesbangpol

TINDAK LANJUT 2018:

- Penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di daerah (34 Provinsi)
- Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di 34 Provinsi
- Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa
- Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial) di daerah

DINAS/SKPD TERKAIT :

- Dinas Sosial
- Dinas Kesehatan

HIGHLIGHT PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN (2)

KEGIATAN PRIORITAS:
Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

KEGIATAN PRIORITAS:
Pemantapan Peran di ASEAN

KEGIATAN PRIORITAS:
Penguatan Diplomasi Ekonomi
dan Kerjasama Pembangunan

PROYEK PRIORITAS NASIONAL:
Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik

PROYEK PRIORITAS NASIONAL:
Proyek Optimalisasi Keterbukaan
Informasi Publik, Penyiaran dan
Pers

PROYEK PRIORITAS NASIONAL:
Penguatan dan Peningkatan Peran
Setnas ASEAN Indonesia

**PROYEK PRIORITAS
NASIONAL:**
Penguatan Diplomasi Maritim

**DASAR
PERTIMBANGAN
/**
TARGET:

- Implementasi inpres 9/2015 tentang pengelolaan komunikasi publik (narasi tunggal)
- Peningkatan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan prioritas pemerintah

TINDAK LANJUT 2018:

- Penyusunan narasi tunggal, kebijakan program pemerintah
- Analisis isu publik pusat dan daerah
- Petugas Informasi Publik di daerah
- Komunikasi publik masyarakat daerah (dialog interaktif, pertunjukan pakayat) dan optimalisasi Media Center
- Literasi terhadap media lokal dan masyarakat

**DINAS/SKPD
TERKAIT :**

- Dinas Kominfo
- Humas/PPID

**DASAR
PERTIMBANGAN/
TARGET:**

- Pelaksanaan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Mendukung Inpres Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Mendukung nawacita nomor 2 tentang tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

DINAS/SKPD TERKAIT :

- KPID
- KI Provinsi
- Dinas Kominfo

**TINDAK
LANJUT 2018:**

- Pembentukan PPID dan implementasinya (kelembagaan, operasionalisasi, daftar informasi publik dan penguatan SDM)
- Pembentukan Komisi Informasi Provinsi, serta penyelesaian sengketa informasi di daerah

**DASAR
PERTIMBANGAN/
TARGET:**

Tersusunnya *grand strategy* nasional pemanfaatan dan peran/kepemimpinan di ASEAN

**DINAS/SKPD
TERKAIT :**

- Bappeda Provinsi
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Koperasi dan UMKM
- BKPM

**TINDAK LANJUT
2018:**

- Perlunya dukungan dan masukan Pemerintah Daerah dalam penyusunan *grand strategy* nasional
- Perlunya kesiapan daerah untuk mendukung kesuksesan implementasi *grand strategy* nasional

**DASAR
PERTIMBANGAN/
TARGET:**

Peningkatan diplomasi maritim, khususnya yang terkait dengan sektor ekonomi

**TINDAK LANJUT
2018:**

- Perlunya dukungan Pemerintah Daerah untuk promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi di Perwakilan RI (Misi Dagang dan Misi Budaya)

DINAS/SKPD TERKAIT :

- Bappeda Provinsi
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Koperasi dan UMKM
- Dinas Pariwisata
- BKPM

KEGIATAN PRIORITAS:
Penegakan Hukum yang Berkualitas

KEGIATAN PRIORITAS:
Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan

PROYEK PRIORITAS NASIONAL:
Pelayanan Hukum yang Mendukung
Kemudahan Berusaha

PROYEK PRIORITAS NASIONAL:
Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak

PROYEK PRIORITAS NASIONAL:
Peningkatan Kerjasama Organisasi Bantuan
Hukum (OBH) dan Paralegal di Kab/Kota dalam
rangka Penyaluran Bantuan Hukum

**DASAR
PERTIMBANGAN:**

Mendukung Iklim
Investasi

**TINDAK LANJUT
2018:**

Mendorong
pembentukan
PTSP di 34
Provinsi, 421
Kabupaten dan 93
Kota

**DINAS/SKPD
TERKAIT :**

- BPPT
- BKPM

**DASAR
PERTIMBANGAN:**

Belum adanya
sistem
pencegahan dan
penanganan kasus
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak secara
terpadu

**TINDAK LANJUT
2018:**

Penanganan kasus
kekerasan
perempuan anak
secara terpadu di 2
daerah percontohan
(Jawa Tengah dan
Kalimantan Tengah)

**DINAS/SKPD
TERKAIT :**

- P2TP2A
- Biro
Pemberdayaan
Perempuan Prov
- Dinas Kesehatan
- Dinas Sosial

**DASAR
PERTIMBANGAN:**

Menjamin
kesamaan
kedudukan di
hadapan hukum
bagi masyarakat
pencari keadilan
yang rentan

**TINDAK LANJUT
2018:**

Kolaborasi
penyaluran bantuan
hukum antara Kanwil
Kemenkumham
dengan OBH dan
Paralegal di 33
Provinsi

**DINAS/SKPD
TERKAIT :**

Biro Hukum Provinsi

HIGHLIGHT PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI

Seluruh Proyek Prioritas bersifat *mainstreaming* yang harus dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah

Kegiatan Prioritas

Perluasan Implementasi *e-Government* yang terintegrasi

Proyek Prioritas

Penerapan, *e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement, e-Performance/e-Reporting* yang terintegrasi

Penerapan *e-Office, e-Arsip, e-Manajemen Kepegawaian, e-Services, e-Pengaduan (LAPOR!)*

Kegiatan Prioritas

Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan

Proyek Prioritas

Pelatihan Aparatur Pelayanan Publik di masing-masing unit pelayanan publik

Penerapan **standar pelayanan publik**, termasuk SPM.

Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat

Kegiatan Prioritas

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen SDM Aparatur

Proyek Prioritas

Pengawasan Daerah atas pelanggaran **netralitas dan sistem merit ASN**

Penguatan **inovasi** dalam kebijakan publik

Penyusunan **Rencana Pengembangan Kapasitas ASN**

Kegiatan Prioritas

Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Proyek Prioritas

Pelaporan **LHKASN** dan pengendalian **grafifikasi**

Peningkatan **kualitas SPIP level 3**

Penerapan **whistle blowing system**

Tindak lanjut Daerah atas rekomendasi BPK, BPKP, Ombudsman RI, KASN, Kementerian PAN dan RB

Standarisasi LPSE (pemenuhan 17 standar LPSE)

Penerapan **re-entry auditor** secara konsisten

Peningkatan **kapabilitas APIP level 3**

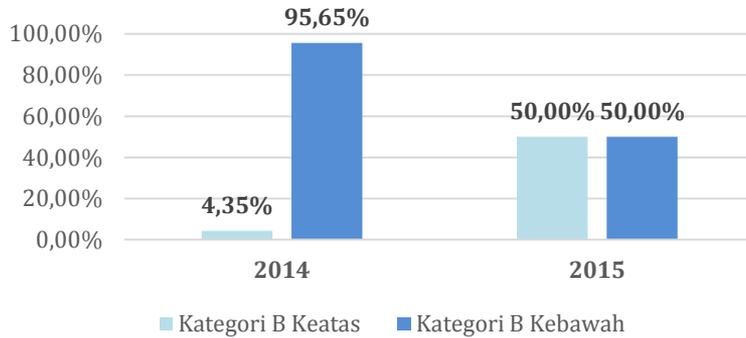
Penguatan **kelembagaan APIP yang independen**

Pengendalian pemanfaatan dana transfer ke daerah dan dana desa

TERIMA KASIH

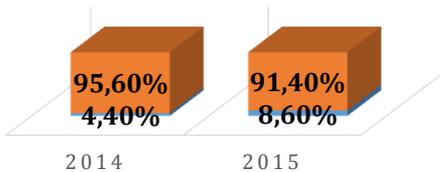
LAMPIRAN

Persentase Akuntabilitas Provinsi atas SAKIP
Tahun 2014-2015

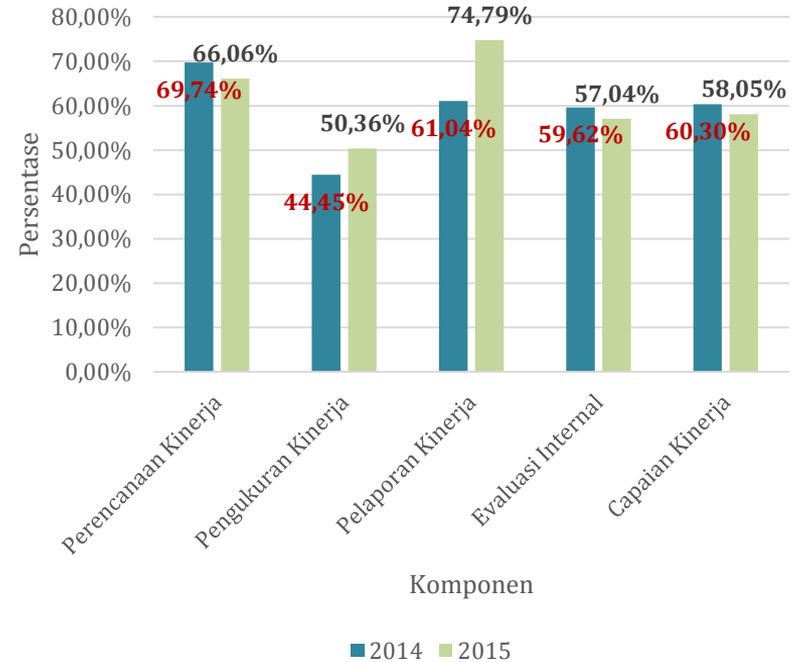


PERSENTASE AKUNTABILITAS KAB/KOTA
ATAS SAKIP
TAHUN 2014-2015

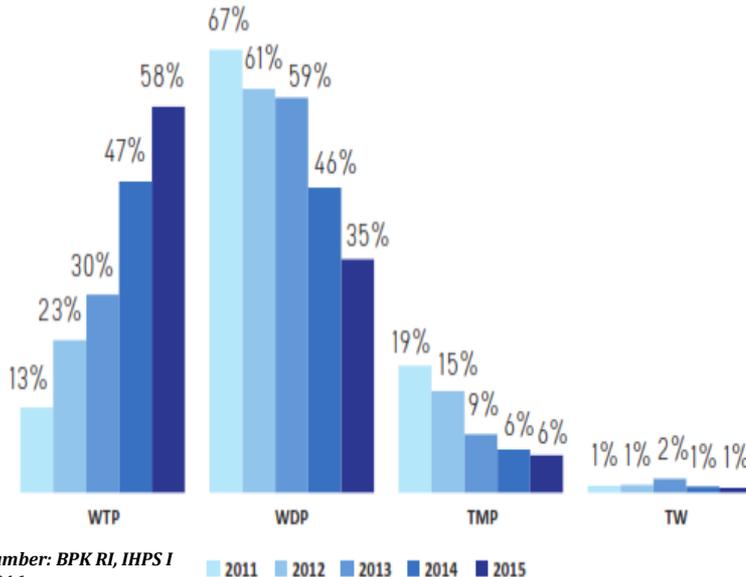
■ Kategori "B" ke atas ■ Kategori "B" ke bawah



Persentase Capaian Komponen SAKIP Provinsi



Grafik Pencapaian Opini WTP Pemerintah Daerah



- Opini LKPD dalam 5 tahun terakhir (2011-2015) mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 45 poin persen, yaitu dari 13% pada tahun 2011 menjadi 58% pada tahun 2015.
- Kenaikan opini dari WDP menjadi WTP disebabkan karena pemda telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akun-akun disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.

EVALUASI CAPAIAN – TINGKAT KEPATUHAN ATAS UU 25/2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Diagram 3. Perbandingan Zonasi Pemerintah Provinsi Tahun 2015 dengan Tahun 2016

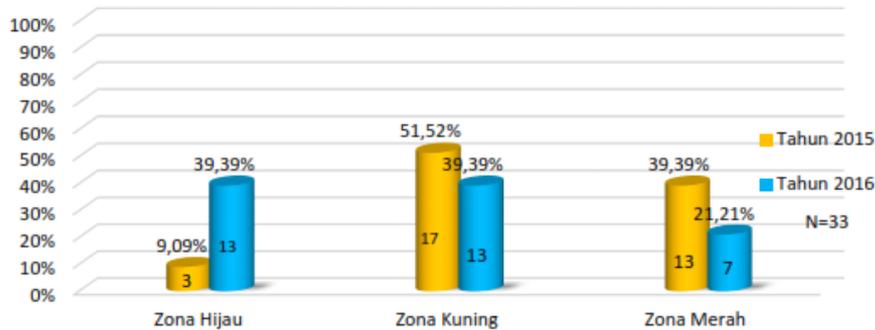
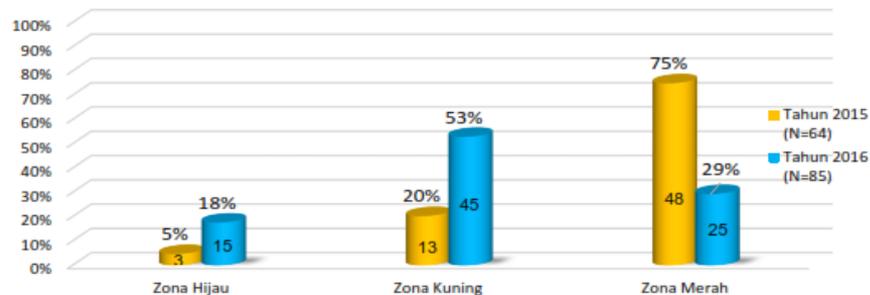


Diagram 4. Perbandingan Zonasi Pemerintah Kabupaten Tahun 2015 dengan Tahun 2016



Temuan

- Di lingkungan provinsi, mayoritas belum mampu menginformasikan (i) pejabat atau petugas pengelolaan pengaduan, (ii) maklumat/janji pelayanan, dan (iii) informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan.
- Di lingkungan kabupaten/kota, (i) hak pengguna berkebutuhan khusus belum terpenuhi, (ii) tidak ada sarana pengukuran kepuasan pelanggan, dan (iii) tidak tersedianya informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan

Indikator	Target 2018
Tingkat Kepatuhan K/L/Pemda dalam Pelaksanaan UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau)	
Kementerian	78
Lembaga	77,5
Provinsi	77,25
Kabupaten/Kota	45,25
Persentase Instansi Pemerintah yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori "B" ke atas)	
Kementerian/Lembaga	69
Provinsi	50
Kabupaten/Kota	35
Opini WTP atas Laporan Keuangan	
Kementerian/Lembaga	91
Provinsi	78
Kabupaten	54
Kota	61
Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor atas SAKIP Kategori "B" keatas)	
Kementerian/Lembaga	80
Provinsi	66
Kabupaten/Kota	40

Indikator	Target 2018
Persentase Instansi Pemerintah dengan Tingkat Kapabilitas APIP (Level 3)	
Kementerian/Lembaga	60
Provinsi	60
Kabupaten/Kota	50
Persentase Instansi Pemerintah dengan Tingkat Kematangan SPIP (Level 3)	
Kementerian/Lembaga	65
Provinsi	65
Kabupaten/Kota	50
Indeks e-Government Nasional	
Kementerian/Lembaga	3,3
Provinsi	3,3
Kabupaten/Kota	3,3
Persentase Penerapan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan dalam APBN/APBD	70

1. Kurangnya pemahaman, komitmen, dan kapasitas dalam melaksanakan RB.
2. Belum adanya peta kebutuhan ASN yang meliputi komposisi jabatan, tingkat pendidikan maupun distribusi antarwilayah.
3. Kapasitas dan kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan.
4. Netralitas ASN dalam pilkada.
5. Belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi pendukung *e-government*.
6. Penyelenggaraan kearsipan belum menjadi prioritas.
7. Masih rendahnya upaya replikasi inovasi pelayanan publik.
8. Penerapan standar pelayanan publik yang belum maksimal.
9. Belum berjalannya standar audit dan kendali mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).